



ANALISIS IMPLEMENTASI SIKLUS PPEPP DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Sri Mulyani¹, Sohiron²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: srimulyaniputrybungsu@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i2.1768>

Sections Info

Article history:

Submitted: 27 January 2026

Final Revised: 11 February 2026

Accepted: 16 March 2026

Published: 30 April 2026

Keywords:

Higher Education Quality

Assurance

PPEPP cycle

SPMI

Higher Education Accreditation



ABSTRACT

Quality assurance in higher education in Indonesia requires the implementation of a structured and sustainable system to ensure the achievement of institutional performance and compliance with accreditation requirements. This article aims to examine the implementation of the PPEPP cycle (Establishment, Implementation, Evaluation, Control, and Improvement) within the higher education quality assurance system, highlighting the role of each stage as an integrated and continuous quality improvement cycle. This study adopts a qualitative descriptive-analytical approach through a review of policy documents, regulations, and relevant academic literature related to quality assurance and higher education accreditation. The results indicate that the establishment of contextual and relevant standards constitutes the primary foundation for the effective implementation of the PPEPP cycle. Consistent implementation of these standards strengthens the effectiveness of the internal quality assurance system. Furthermore, evaluation and control conducted through internal quality audits serve as reflective mechanisms to ensure performance accountability, while continuous quality improvement directly supports the achievement of outcome-based accreditation. These findings demonstrate that the PPEPP cycle functions not merely as an administrative requirement, but as a strategic framework for enhancing the quality and competitiveness of higher education institutions in a sustainable manner.

ABSTRAK

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia menuntut implementasi sistem yang terstruktur dan berkelanjutan guna menjamin ketercapaian kinerja institusional serta pemenuhan tuntutan akreditasi. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, dengan menekankan peran setiap tahapan sebagai satu kesatuan siklus peningkatan mutu berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui telaah dokumen kebijakan, regulasi, dan literatur ilmiah yang relevan dengan penjaminan mutu dan akreditasi pendidikan tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penetapan standar yang kontekstual menjadi fondasi utama keberhasilan siklus PPEPP, sementara pelaksanaan standar yang konsisten memperkuat efektivitas sistem penjaminan mutu internal. Evaluasi dan pengendalian melalui audit mutu internal berfungsi sebagai mekanisme reflektif untuk menjaga keterlacakan kinerja, sedangkan peningkatan mutu berkelanjutan berkontribusi langsung terhadap pemenuhan akreditasi berbasis luaran. Temuan ini menegaskan bahwa siklus PPEPP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi sebagai strategi strategis dalam meningkatkan mutu dan daya saing perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Kata kunci: penjaminan mutu pendidikan tinggi, siklus PPEPP, SPMI, akreditasi perguruan tinggi

PENDAHULUAN

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia merupakan agenda strategis yang diarahkan untuk memastikan ketercapaian standar mutu secara berkelanjutan di tengah dinamika perubahan kebijakan, tuntutan akuntabilitas publik, dan persaingan global antarperguruan tinggi. Secara normatif, penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi berlandaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan kewajiban perguruan tinggi dalam menjamin mutu internal dan eksternal. Ketentuan tersebut diperkuat melalui kebijakan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menempatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai instrumen utama peningkatan mutu berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Berbagai penelitian dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa efektivitas penjaminan mutu pendidikan tinggi sangat dipengaruhi oleh konsistensi implementasi siklus mutu dan keterpaduan antar tahapan dalam sistem internal perguruan tinggi. Studi-studi mutakhir mengindikasikan bahwa perguruan tinggi yang mengimplementasikan siklus penjaminan mutu secara terintegrasi cenderung memiliki tata kelola akademik yang lebih adaptif, capaian kinerja institusional yang lebih stabil, serta kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi evaluasi eksternal dan akreditasi. Namun, temuan lain mengungkapkan bahwa implementasi penjaminan mutu di sejumlah perguruan tinggi masih menghadapi kendala berupa pelaksanaan yang bersifat prosedural, lemahnya fungsi evaluasi internal, serta keterbatasan tindak lanjut hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan mutu yang berkelanjutan (Sukoco et al., 2020; Jarodi et al., 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif penjaminan mutu dan praktik implementatif di tingkat institusi. Sejumlah penelitian lebih banyak menyoroati aspek tertentu dari penjaminan mutu, seperti audit mutu internal atau pemenuhan standar akreditasi, tanpa mengkaji secara komprehensif keterhubungan antar tahapan dalam siklus PPEPP sebagai satu kesatuan sistem mutu. Padahal, efektivitas penjaminan mutu tidak hanya ditentukan oleh keberadaan standar dan dokumen, melainkan oleh sejauh mana seluruh tahapan siklus PPEPP dijalankan secara konsisten dan saling berkelanjutan. Keterbatasan kajian yang menganalisis implementasi siklus PPEPP secara utuh inilah yang menjadi *research gap* dalam penelitian ini (Prasetyo & Anwar, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian difokuskan pada bagaimana implementasi siklus PPEPP dijalankan dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia serta sejauh mana siklus tersebut berfungsi sebagai mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan sesuai dengan kerangka kebijakan yang berlaku. Secara implisit, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa implementasi siklus PPEPP yang terintegrasi dan berkelanjutan berkontribusi positif terhadap efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal di perguruan tinggi (Sallis, 2014).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan serta hasil penelitian empiris sepuluh tahun terakhir yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pola implementasi siklus PPEPP, tantangan yang dihadapi, serta implikasinya terhadap peningkatan mutu institusional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi siklus PPEPP dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia secara komprehensif, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, serta memberikan implikasi teoretis dan praktis bagi penguatan tata kelola mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur sistematis untuk menganalisis implementasi penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui siklus PPEPP dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal. Bahan penelitian meliputi dokumen kebijakan nasional yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir. Prosedur penelitian dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan telaah kritis sumber berdasarkan relevansi dan kredibilitas, diikuti dengan ekstraksi data yang berkaitan dengan tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi secara kualitatif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan setiap tahapan siklus PPEPP untuk mengidentifikasi pola implementasi, tantangan, dan implikasinya terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. langsung, sekaligus memberikan landasan teoritik yang sesuai dengan fokus kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) diposisikan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan kebijakan mutu dengan praktik pengelolaan institusi secara berkelanjutan. Literatur nasional dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa PPEPP tidak dipahami sebagai rangkaian tahapan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan proses yang saling terkait dan membentuk mekanisme pembelajaran institusional. Melalui keterpaduan antar tahap, siklus ini memungkinkan perguruan tinggi memastikan konsistensi antara standar yang ditetapkan dan capaian mutu yang dihasilkan (Hidayat & Machali, 2019; Rahmawati, 2020).

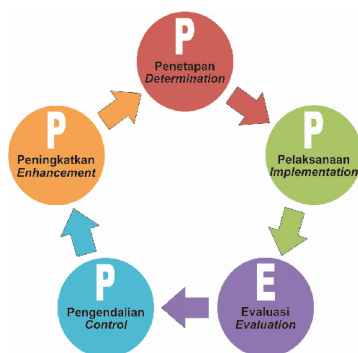
Tahap penetapan standar mutu berfungsi sebagai titik awal yang menentukan arah pengelolaan mutu institusi. Kajian di berbagai perguruan tinggi Indonesia menekankan bahwa kualitas tahap ini berpengaruh langsung terhadap efektivitas tahapan berikutnya, karena standar menjadi rujukan bagi seluruh aktivitas akademik dan nonakademik. Standar yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan internal dan evaluasi diri institusi cenderung lebih adaptif dan mendorong keterlibatan unit pelaksana dalam proses mutu secara berkelanjutan (Yuliana & Suryadi, 2021). Dengan demikian, penetapan standar tidak dapat dilepaskan dari konteks institusional dan dinamika pengelolaan pendidikan tinggi.

Pelaksanaan standar merupakan fase operasional yang menguji sejauh mana kebijakan mutu terinternalisasi dalam praktik kelembagaan. Literatur nasional menyoroti bahwa pelaksanaan standar mutu sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, budaya mutu, serta sistem koordinasi internal yang efektif. Ketidaksinambungan antara penetapan dan pelaksanaan sering kali menyebabkan penjaminan mutu berjalan secara administratif tanpa menghasilkan perubahan substantif (Fauzi & Mulyono, 2018). Oleh karena itu, pelaksanaan dipahami sebagai proses strategis yang menghubungkan perencanaan mutu dengan realitas pelaksanaan di tingkat program studi dan unit kerja.

Evaluasi dan pengendalian dalam siklus PPEPP dipandang sebagai mekanisme refleksi kritis terhadap efektivitas pelaksanaan standar. Studi-studi nasional menunjukkan bahwa audit mutu internal berperan penting dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian dan area perbaikan, sekaligus menjadi instrumen pengendalian agar pelaksanaan tetap berada dalam koridor standar yang ditetapkan (Nugroho & Widodo, 2017). Tahap peningkatan kemudian menjadi wujud konkret dari pembelajaran institusional, di mana hasil evaluasi

dan pengendalian digunakan untuk menyempurnakan standar, kebijakan, serta praktik pengelolaan mutu secara berkelanjutan (Prasetyo & Lestari, 2022).

Dengan keterkaitan yang saling menguatkan antar tahapan tersebut, siklus PPEPP membentuk satu kesatuan proses peningkatan mutu berkelanjutan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Untuk memperjelas hubungan antar tahapan dalam siklus tersebut, visualisasi siklus PPEPP disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1. Siklus PPEPP dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi memerlukan mekanisme kerja yang mampu menerjemahkan kebijakan mutu ke dalam praktik institusional secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, siklus PPEPP digunakan sebagai alur kerja yang menggambarkan bagaimana standar mutu dirumuskan, dijalankan, ditelaah, dan disempurnakan secara berulang agar tetap relevan dengan kebutuhan pengelolaan pendidikan tinggi. Alur ini menempatkan setiap tahapan sebagai bagian dari proses yang saling memengaruhi, sehingga capaian mutu tidak dipandang sebagai hasil akhir semata, melainkan sebagai proses yang terus diperbaiki melalui umpan balik internal. Untuk memahami cara kerja mekanisme tersebut secara lebih operasional, uraian berikut menyajikan penjelasan setiap tahapan dalam siklus PPEPP beserta contoh penerapannya.

a. Penetapan

Tahap penetapan digambarkan sebagai titik awal yang menunjukkan proses perumusan arah dan ketentuan awal suatu kegiatan. Penetapan dimaknai sebagai aktivitas menentukan perencanaan, target, serta mekanisme pelaksanaan yang akan dijadikan acuan pada tahap berikutnya. Tahap ini penting karena menjadi dasar pergerakan siklus secara keseluruhan. Contohnya, perguruan tinggi menetapkan perencanaan kegiatan akademik semesteran, termasuk penjadwalan perkuliahan dan mekanisme evaluasi akhir periode.

b. Pelaksanaan

pelaksanaan digambarkan sebagai kelanjutan langsung dari penetapan yang menunjukkan penerapan rencana ke dalam praktik nyata. Pelaksanaan dipahami sebagai proses menjalankan seluruh ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan secara konsisten oleh pelaksana kegiatan. Tahap ini memperlihatkan bagaimana rencana diwujudkan dalam aktivitas operasional sehari-hari. Contohnya, dosen dan program studi menjalankan kegiatan perkuliahan sesuai jadwal dan perencanaan yang telah disusun pada awal semester.

c. Evaluasi

Tahap evaluasi digambarkan sebagai proses penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung. Evaluasi dimaknai sebagai upaya menelaah kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan untuk memperoleh gambaran capaian serta kendala yang terjadi. Tahap ini berfungsi sebagai sarana refleksi institusional sebelum

dilakukan tindak lanjut. Contohnya, perguruan tinggi melakukan peninjauan kegiatan perkuliahan pada akhir semester melalui telaah dokumen pembelajaran, tingkat kehadiran, dan umpan balik mahasiswa.

d. Pengendalian

Pengendalian pada gambar siklus PPEPP ditunjukkan sebagai tahapan yang memastikan hasil evaluasi direspons secara sistematis. Pengendalian dimaknai sebagai proses pemberian arahan, koreksi, dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan agar tetap berjalan sesuai perencanaan. Tahap ini menghubungkan evaluasi dengan perbaikan yang akan dilakukan. Contohnya, program studi memberikan arahan perbaikan terhadap pelaksanaan perkuliahan yang belum sesuai serta memantau pelaksanaannya pada periode berikutnya.

e. Peningkatan

Tahap peningkatan digambarkan sebagai proses penyempurnaan yang mengarahkan siklus kembali ke tahap awal. Peningkatan dimaknai sebagai upaya memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil pengendalian sebelumnya. Tahap ini menunjukkan bahwa PPEPP bersifat berulang dan berkelanjutan. Contohnya, perguruan tinggi menyempurnakan perencanaan kegiatan akademik pada semester berikutnya dengan menyesuaikan mekanisme pelaksanaan agar lebih efektif.

1. Penetapan Standar Mutu sebagai Tahap Awal Siklus PPEPP

Penetapan standar mutu menempati posisi paling menentukan dalam siklus PPEPP karena menjadi titik awal yang mengarahkan keseluruhan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan kebijakan BAN-PT tahun 2025, standar mutu internal dipandang bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen strategis yang mencerminkan komitmen institusi terhadap pencapaian kinerja tridarma dan tata kelola yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penetapan standar menjadi fondasi bagi keterpaduan antara sistem penjaminan mutu internal dan mekanisme akreditasi eksternal melalui IAPS 4.0 dan IAPT 3.0.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang menetapkan standar mutu secara kontekstual dan selaras dengan indikator kinerja akreditasi cenderung memiliki kesiapan institusional yang lebih baik. IAPS 4.0 dan IAPT 3.0 menuntut keterlacakan antara standar yang ditetapkan dengan implementasi, evaluasi, serta peningkatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kualitas tahap penetapan standar berpengaruh langsung terhadap kemampuan perguruan tinggi dalam menunjukkan konsistensi siklus PPEPP sebagai satu kesatuan proses. Penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa standar yang disusun tanpa analisis kebutuhan dan evaluasi diri sering kali sulit diimplementasikan secara efektif pada tahap berikutnya (Suryadi & Handayani, 2019).

Penetapan standar mutu juga berfungsi sebagai mekanisme penyalarsan antara visi institusi dan tuntutan eksternal. Kebijakan akreditasi terbaru menekankan pendekatan berbasis kinerja dan dampak, sehingga standar internal harus mampu menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam sasaran operasional yang realistis. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa institusi yang menjadikan akreditasi sebagai referensi utama dalam penetapan standar cenderung lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan dan lebih siap menghadapi proses evaluasi eksternal (Rahmawati et al., 2021). Hal ini menegaskan bahwa standar mutu tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan praktik institusional.

Dari perspektif penjaminan mutu, tahap penetapan standar berperan sebagai alat kendali awal yang mencegah terjadinya ketidaksesuaian sistemik. Standar yang dirumuskan secara jelas memungkinkan perguruan tinggi mengidentifikasi risiko mutu sejak awal siklus, sebelum memasuki tahap pelaksanaan. Penelitian oleh Hidayat dan Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa kejelasan standar internal berkontribusi terhadap meningkatnya konsistensi pelaksanaan program akademik serta mempermudah proses evaluasi internal. Temuan ini relevan dengan kerangka IAPS 4.0 dan IAPT 3.0 yang menuntut bukti keterkaitan antara perencanaan dan capaian kinerja.

Penetapan standar mutu memiliki implikasi strategis terhadap budaya mutu institusi. Ketika standar ditetapkan melalui proses partisipatif dan berbasis refleksi institusional, standar tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai mutu. Penelitian di berbagai perguruan tinggi Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan sivitas akademika dalam proses penetapan standar meningkatkan rasa kepemilikan terhadap sistem penjaminan mutu dan memperkuat keberlanjutan siklus PPEPP (Nugroho & Wibowo, 2018). Dengan demikian, standar mutu berperan sebagai pemicu terbentuknya praktik peningkatan berkelanjutan.

Kerangka akreditasi BAN-PT 2025, penetapan standar mutu yang selaras dengan IAPS 4.0 dan IAPT 3.0 memungkinkan perguruan tinggi membangun narasi kinerja yang koheren. Standar menjadi rujukan utama dalam menunjukkan ketercapaian luaran, keberlanjutan program, dan dampak institusional. Studi terbaru menegaskan bahwa kegagalan pada tahap penetapan standar sering kali menyebabkan siklus PPEPP berjalan secara parsial dan tidak optimal (Fitriani & Kurniawan, 2022). Oleh karena itu, penguatan tahap awal ini menjadi kebutuhan strategis bagi perguruan tinggi dalam menghadapi tuntutan mutu dan akreditasi.

Penetapan standar mutu merupakan fondasi utama dalam siklus PPEPP yang menentukan arah, konsistensi, dan keberlanjutan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dalam kerangka kebijakan BAN-PT 2025 serta instrumen IAPS 4.0 dan IAPT 3.0, tahap ini tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan formal, tetapi sebagai titik awal strategis yang memastikan seluruh siklus PPEPP berjalan efektif dan berdampak nyata.

2. Pelaksanaan Standar Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pelaksanaan standar mutu merupakan fase krusial yang menentukan apakah rumusan standar yang telah ditetapkan benar-benar terinternalisasi ke dalam praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi. Implementasi standar mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal tercermin melalui konsistensi pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik sesuai rencana institusional serta keterhubungannya dengan sasaran kinerja yang telah dirumuskan. Pelaksanaan tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, melainkan menuntut integrasi standar ke dalam proses kerja unit, program, dan aktor pelaksana. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan standar sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman sivitas akademika, dukungan pimpinan, serta kejelasan mekanisme operasional yang diturunkan dari standar tersebut (Setiawan & Maulida, 2019). Kondisi ini menegaskan bahwa pelaksanaan standar merupakan arena utama pengujian relevansi dan kelayakan standar yang ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan standar mutu juga berfungsi sebagai penghubung antara perencanaan dan pembuktian kinerja institusi. Standar yang telah dirumuskan memperoleh makna operasional ketika diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran, pengelolaan sumber daya, serta layanan akademik yang terukur dan terdokumentasi. Ketidaksesuaian

antara standar dan pelaksanaan sering menjadi sumber utama lemahnya siklus penjaminan mutu karena menghambat keterlacakan capaian yang dibutuhkan dalam evaluasi internal. Studi empiris pada perguruan tinggi Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan standar yang tidak konsisten menyebabkan siklus PPEPP berjalan parsial dan berorientasi dokumen semata tanpa perbaikan substantif (Kusuma & Arifin, 2020). Temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas pelaksanaan menentukan sejauh mana standar berfungsi sebagai instrumen pengendali mutu yang efektif.

Keterkaitan pelaksanaan standar dengan efektivitas siklus PPEPP tampak pada kemampuannya menghasilkan data dan bukti kinerja yang valid. Praktik pelaksanaan yang sistematis memungkinkan perguruan tinggi mengidentifikasi capaian dan deviasi secara objektif sehingga proses evaluasi dan pengendalian dapat dilakukan secara berbasis bukti. Penelitian lain menegaskan bahwa pelaksanaan standar yang didukung sistem dokumentasi, monitoring, dan pelaporan yang baik memperkuat kesinambungan antar tahapan siklus PPEPP (Lestari & Widodo, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bukan sekadar tahap eksekusi, melainkan mekanisme produksi informasi mutu yang menentukan kualitas pengambilan keputusan strategis institusional.

Konsistensi pelaksanaan standar mutu juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dalam mengelola perubahan dan memastikan kepatuhan substantif di tingkat pelaksana. Standar yang telah ditetapkan akan sulit dijalankan apabila tidak disertai penguatan koordinasi antarunit dan mekanisme pengawasan internal yang jelas. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kontrol implementasi menyebabkan standar hanya berfungsi sebagai dokumen formal tanpa dampak nyata terhadap proses akademik (Rahman & Putri, 2021). Oleh karena itu, pelaksanaan standar menuntut sinergi antara perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan agar siklus penjaminan mutu berjalan secara utuh.

Aspek penting lain dari pelaksanaan standar mutu terletak pada implikasinya terhadap budaya kerja organisasi. Pelaksanaan yang dilakukan secara konsisten dan melibatkan unit pelaksana secara aktif berkontribusi pada pembentukan kebiasaan kerja berbasis standar. Penelitian pada berbagai konteks perguruan tinggi menunjukkan bahwa internalisasi standar melalui praktik rutin mendorong peningkatan kepatuhan substantif dibandingkan kepatuhan administratif semata (Sari & Hidayat, 2018). Situasi tersebut memperkuat pandangan bahwa pelaksanaan standar berperan strategis dalam menggeser penjaminan mutu dari pendekatan formalistik menuju pendekatan berbasis praktik berkelanjutan.

Pelaksanaan standar mutu juga memiliki implikasi langsung terhadap kesiapan institusi menghadapi tuntutan akreditasi. Standar yang dilaksanakan secara konsisten menghasilkan keselarasan antara aktivitas institusional dan indikator kinerja yang dinilai secara eksternal. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa perguruan tinggi dengan tingkat keterlaksanaan standar yang tinggi cenderung memiliki performa akreditasi lebih stabil dan berkelanjutan (Prabowo & Yuliana, 2022). Temuan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan standar bukan hanya kepentingan internal, tetapi juga menentukan posisi institusi dalam sistem penjaminan mutu eksternal nasional.

Pelaksanaan standar mutu merupakan fase penentu yang menjamin kesinambungan dan konsistensi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Implementasi standar yang efektif memperkuat keterhubungan antar tahap siklus PPEPP, menghasilkan bukti kinerja yang dapat dievaluasi, serta mendorong terbentuknya praktik peningkatan mutu berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan

standar mutu menempati peran strategis sebagai penggerak utama yang memastikan sistem penjaminan mutu tidak berhenti pada perencanaan, tetapi berfungsi nyata dan berkelanjutan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi.

3. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Standar melalui Audit Mutu Internal (AMI)

Evaluasi pelaksanaan standar merupakan tahapan yang memastikan bahwa implementasi SPMI berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi biasanya dilakukan secara berkala melalui pengumpulan data, peninjauan dokumen, dan observasi pelaksanaan kegiatan akademik maupun layanan institusi. Proses ini membutuhkan instrumen evaluasi yang jelas serta sistem pelaporan yang memungkinkan unit penjaminan mutu menilai kesesuaian antara standar dan praktik lapangan (Syafaruddin & Nasution, 2017). Monitoring yang sistematis juga memungkinkan perguruan tinggi mengidentifikasi area kinerja yang belum mencapai target standar serta melakukan tindakan korektif berbasis data.

Audit Mutu Internal (AMI) menjadi instrumen evaluasi yang paling formal dalam tahapan ini. AMI dilakukan untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan standar di tingkat program studi, fakultas, dan unit layanan dengan dokumen SPMI, termasuk kebijakan mutu, manual mutu, dan SOP. Auditor internal menilai aspek kesesuaian, efektivitas, serta konsistensi pelaksanaan proses, lalu mendokumentasikan temuan dalam laporan audit yang menjadi dasar tindakan perbaikan (Rahayu & Arifin, 2021). Pelaksanaan AMI membutuhkan auditor yang tersertifikasi atau dilatih secara khusus agar proses audit berlangsung objektif, tidak menghakimi, dan berfokus pada peningkatan mutu, bukan kontrol administratif semata. Di beberapa perguruan tinggi, AMI juga dikombinasikan dengan monitoring berbasis aplikasi untuk mempermudah verifikasi data pendukung.

Tindak lanjut temuan audit menjadi bagian sentral dari pengendalian standar. Temuan audit biasanya diklasifikasikan menjadi ketidaksesuaian mayor, minor, dan observasi perbaikan, masing-masing dengan rekomendasi dan batas waktu penyelesaian. Unit yang diaudit diwajibkan menyiapkan rencana perbaikan (Corrective Action Plan) yang memuat langkah perbaikan, penanggung jawab, serta bukti penyelesaian. Tanpa tindak lanjut yang terpantau, audit hanya menjadi aktivitas administratif tanpa dampak terhadap mutu institusi (Supriyadi et al., 2020). Oleh karena itu, banyak perguruan tinggi membangun mekanisme pengendalian berupa rapat tindak lanjut, monitoring berbasis sistem informasi mutu, serta evaluasi capaian perbaikan pada siklus audit berikutnya.

Pengendalian mutu dalam konteks PPEPP juga mencakup upaya memastikan bahwa standar tetap selaras dengan regulasi nasional, khususnya SN-Dikti. Ketika ada pembaruan regulasi atau perubahan kebijakan kementerian, perguruan tinggi wajib meninjau kembali standar yang ada agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara dokumen mutu dan tuntutan eksternal. Mekanisme pengendalian biasanya dilakukan melalui rapat tinjauan manajemen, revisi manual mutu, serta harmonisasi indikator kinerja institusional dengan indikator nasional seperti IKU/PTN atau indikator akreditasi terbaru (Basri & Azmi, 2019). Proses ini menuntut kemampuan institusi merespons perubahan dengan cepat agar implementasi mutu tidak tertinggal dari dinamika kebijakan pendidikan tinggi.

Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian mutu tidak lepas dari berbagai hambatan. Beberapa perguruan tinggi masih menghadapi keterbatasan data, ketidaksiapan SDM auditor, kurangnya dokumentasi pelaksanaan standar, serta lemahnya komitmen unit terhadap tindak lanjut audit. Hambatan lainnya muncul ketika budaya mutu belum

terbentuk secara menyeluruh, sehingga unit menganggap audit sebagai beban administratif, bukan sarana perbaikan. Kondisi ini mengakibatkan temuan audit berulang setiap tahun dan proses peningkatan mutu berjalan lambat. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan pengendalian standar membutuhkan dukungan sistem, kompetensi SDM, serta budaya mutu yang kuat.

4. Peningkatan Mutu Berkelanjutan dan Dampaknya terhadap Akreditasi Perguruan Tinggi

Peningkatan mutu berkelanjutan merepresentasikan fase strategis yang menentukan keberlanjutan kinerja institusional perguruan tinggi setelah proses evaluasi dan pengendalian dilakukan. Tahap ini memusatkan perhatian pada tindak lanjut sistematis terhadap temuan evaluasi internal melalui perbaikan kebijakan, proses, dan praktik akademik. Sejumlah studi menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang secara konsisten melaksanakan peningkatan berbasis bukti mampu menjaga stabilitas kinerja tridarma serta memperkuat kesiapan akreditasi berbasis luaran (Wibowo & Nugraha, 2019). Fokus peningkatan yang terarah memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak bersifat reaktif, melainkan terencana dan berorientasi dampak jangka menengah. Pendekatan ini menempatkan peningkatan sebagai mekanisme pembelajaran organisasi berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal.

Peningkatan mutu berkelanjutan memiliki keterkaitan langsung dengan akreditasi perguruan tinggi yang menekankan pencapaian luaran dan dampak. Sistem akreditasi nasional menilai konsistensi peningkatan melalui bukti tindak lanjut atas kelemahan sebelumnya serta keberhasilan mempertahankan praktik unggul. Penelitian di konteks Indonesia menegaskan bahwa institusi yang mengintegrasikan rencana peningkatan ke dalam perencanaan strategis menunjukkan kenaikan peringkat akreditasi yang lebih berkelanjutan (Sulastri & Karim, 2020). Relasi ini menegaskan bahwa akreditasi berfungsi sebagai refleksi atas kualitas peningkatan internal yang dijalankan. Keterkaitan tersebut menuntut konsistensi data kinerja, indikator terukur, dan keberlanjutan program peningkatan lintas unit agar selaras dengan ekspektasi pemangku kepentingan eksternal dan internal institusi pendidikan tinggi.

Pola peningkatan mutu yang efektif dicirikan oleh kemampuan institusi memanfaatkan hasil audit dan evaluasi sebagai dasar inovasi kebijakan akademik. Proses ini mendorong perguruan tinggi beralih dari pemenuhan administratif menuju perbaikan substantif yang berdampak pada pengalaman belajar dan produktivitas riset. Temuan empiris menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan sangat ditentukan oleh kepemimpinan mutu dan kapasitas organisasi dalam mengelola perubahan (Hidayah & Prasetyo, 2021). Aspek tersebut memperkuat argumentasi bahwa peningkatan berkelanjutan memerlukan dukungan struktural dan kultural. Sinergi kebijakan, sumber daya, dan partisipasi sivitas akademika menjadi prasyarat keberhasilan implementasi berkelanjutan pada tingkat program studi, fakultas, serta institusi secara menyeluruh dan terkoordinasi nasional berkelanjutan efektif adaptif.

Dampak peningkatan mutu berkelanjutan terhadap akreditasi tidak hanya tercermin pada peringkat, tetapi juga pada keberlanjutan reputasi institusi. Akreditasi berbasis luaran menilai sejauh mana perbaikan menghasilkan perubahan nyata dan terukur. Studi mutakhir mengungkapkan bahwa perguruan tinggi dengan siklus peningkatan yang terdokumentasi baik mampu menunjukkan keterlacakan capaian secara meyakinkan (Rahman & Lestari, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan berkelanjutan berfungsi sebagai bukti akuntabilitas publik. Akuntabilitas

tersebut memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan serta legitimasi kebijakan peningkatan yang dijalankan institusi pada level nasional, regional, dan internasional melalui transparansi kinerja, pelaporan, dan evaluasi berkelanjutan sistemik terintegrasi berorientasi dampak publik pendidikan tinggi berkelanjutan adaptif strategis kolektif nasional.

Implikasi teoritis peningkatan mutu berkelanjutan terletak pada penguatan penjaminan mutu sebagai proses pembelajaran institusional. Praktik peningkatan yang konsisten menegaskan bahwa mutu berkembang melalui siklus reflektif dan adaptif, bukan intervensi sesaat. Penelitian lain menunjukkan bahwa integrasi peningkatan ke dalam tata kelola memperkuat kesinambungan kinerja dan hasil akreditasi (Utami & Fauzan, 2018). Implikasi praktisnya mendorong perguruan tinggi memprioritaskan peningkatan sebagai strategi utama penjaminan mutu jangka panjang. Strategi ini memastikan konsistensi kinerja, relevansi kebijakan, dan keberlanjutan mutu pendidikan tinggi Indonesia dalam menghadapi dinamika regulasi, persaingan, tuntutan akuntabilitas publik, dan perubahan global berkelanjutan adaptif sistemik strategis nasional kolektif berorientasi luaran jangka panjang terukur konsisten.

KESIMPULAN

Implementasi siklus PPEPP merupakan mekanisme kunci dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi yang menuntut keterpaduan antar tahapan secara berkelanjutan. Penetapan standar mutu berperan sebagai fondasi awal yang menentukan arah pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu institusi. Konsistensi pelaksanaan standar serta efektivitas evaluasi dan pengendalian melalui audit mutu internal menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan siklus PPEPP. Tahap peningkatan mutu berkelanjutan memperkuat keterkaitan antara penjaminan mutu internal dan akreditasi berbasis luaran, sehingga perguruan tinggi mampu menunjukkan perbaikan kinerja yang terukur dan berkelanjutan. Dengan demikian, siklus PPEPP berfungsi tidak hanya sebagai kerangka administratif, tetapi sebagai strategi peningkatan mutu institusional yang adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan.

REFERENSI

- Fauzi, A., & Mulyono, S. E. (2018). Implementasi sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu akademik. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(2), 87–98. <https://doi.org/10.17509/jmp.v13i2.12345>
- Fitriani, D., & Kurniawan, R. (2022). Implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam mendukung akreditasi perguruan tinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 29(2), 215–227.
- Hidayah, N., & Prasetyo, A. (2021). Kepemimpinan mutu dan pengelolaan perubahan dalam peningkatan mutu perguruan tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(1), 45–58.
- Hidayat, A., & Machali, I. (2019). Penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam perspektif manajemen strategik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 255–270. <https://doi.org/10.14421/jpi.2019.82.255-270>
- Hidayat, T., & Prasetyo, Z. K. (2020). Peran standar mutu internal dalam peningkatan kinerja perguruan tinggi. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 24(1), 45–56.
- Kusuma, R. D., & Arifin, M. (2020). Pelaksanaan standar mutu dan tantangan implementasi sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi. *Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan*, 5(1), 41–53.
- Lestari, S., & Widodo, H. (2021). Dokumentasi mutu dan kesinambungan siklus PPEPP dalam sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. *Jurnal Penelitian Pendidikan*,

21(2), 178–190.

- Nugroho, A., & Wibowo, U. B. (2018). Pengembangan budaya mutu melalui sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 23(4), 389–402.
- Nugroho, R., & Widodo, S. (2017). Audit mutu internal sebagai instrumen pengendalian mutu perguruan tinggi. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5(2), 147–158. <https://doi.org/10.21831/amp.v5i2.14290>
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Prabowo, R., & Yuliana, L. (2022). Keterlaksanaan standar mutu dan performa akreditasi perguruan tinggi di Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 9(1), 25–39.
- Prasetyo, A., & Anwar, K. (2021). Implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan kinerja perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Tinggi dan Kebijakan*, 15(2), 137–149.
- Prasetyo, E., & Lestari, S. (2022). Peningkatan mutu berkelanjutan melalui siklus PPEPP pada sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 29(1), 65–78. <https://doi.org/10.17509/jap.v29i1.45123>
- Rahayu, I., & Arifin, Z. (2021). Audit mutu internal sebagai instrumen evaluasi implementasi SPMI. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 12(2), 112–130. <https://doi.org/10.23960/jep.v12i2.2021>
- Rahman, A., & Lestari, P. (2022). Akreditasi berbasis luaran dan akuntabilitas mutu pendidikan tinggi. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 14(1), 45–59.
- Rahman, F., & Putri, D. A. (2021). Pengawasan internal dan kepatuhan implementasi standar mutu pendidikan tinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(2), 167–180.
- Rahmawati, Y. (2020). Sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan daya saing perguruan tinggi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 26(2), 101–112. <https://doi.org/10.17977/um048v26i2p101-112>
- Rahmawati, Y., Setiawan, A., & Lestari, I. (2021). Kesiapan perguruan tinggi menghadapi akreditasi berbasis kinerja melalui penguatan SPMI. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(2), 101–112.
- Sallis, E. (2014). *Total quality management in education* (3rd ed.). Routledge.
- Sari, D., & Hidayat, R. (2018). Internalisasi standar mutu melalui praktik kelembagaan perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 23(3), 301–312.
- Setiawan, A., & Maulida, S. (2019). Peran kepemimpinan dalam pelaksanaan standar mutu internal perguruan tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 95–108.
- Sukoco, I., Hardhienata, S., & Wibowo, U. B. (2020). Internal quality assurance as a strategy for sustainable higher education governance. *International Journal of Educational Management*, 34(7), 1147–1161. <https://doi.org/10.1108/IJEM-11-2019-0389>
- Sulastri, S., & Karim, A. (2020). Perencanaan strategis dan peningkatan peringkat akreditasi perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Tinggi dan Kebijakan*, 5(1), 60–74.
- Supriyadi, T., Wahyudi, & Hanifah, I. (2020). Pengendalian mutu melalui tindak lanjut audit internal pada perguruan tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 67–79. <https://doi.org/10.21009/jmp.v8i1.2020>
- Suryadi, B., & Handayani, S. (2019). Analisis penetapan standar dalam sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 25(3), 233–244. <https://doi.org/10.17977/um048v25i3p233-244>
- Syafaruddin, & Nasution, N. (2017). Monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari pengendalian mutu pendidikan tinggi. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 8(1), 1–13.

<https://doi.org/10.24036/jep.v8i1.2017>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Utami, R., & Fauzan, A. (2018). Tata kelola mutu dan kesinambungan akreditasi perguruan tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(2), 129–142.

Wibowo, A., & Nugraha, R. (2019). Peningkatan mutu berbasis bukti dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 5(2), 87–99.

Yuliana, R., & Suryadi, A. (2021). Penguatan budaya mutu melalui implementasi PPEPP pada perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(1), 45–58.
<https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i1.1987>

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA